

**ANALISA PEMBAHARUAN HUKUM PERIZINAN
BERUSAHA TERINTEGRASI DALAM PERSPEKTIF
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

T E S I S

Oleh:

**SLAMET BUDI MULYONO
201820251003**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
JAKARTA
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : Pembaharuan Hukum Perizinan Berusaha
Terintegrasi Dalam Perspektif Pemerintah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nama Mahasiswa : Slamet Budi Mulyono

Nomor Pokok Mahasiswa : 201820251003

Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum / Hukum

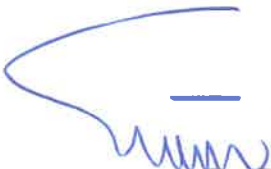
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

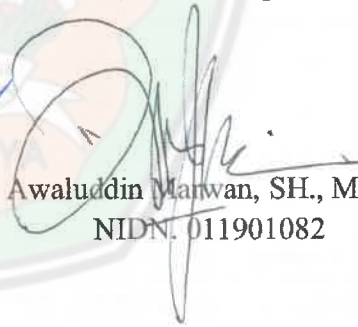
Jakarta, ... Januari 2021

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Dr. H. Erwin Owan H., SH., MH.
NIDN. 010803017


Dr. Awaluddin Marwan, SH., MH., MA.
NIDN. 011901082

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : Analisa Pembaharuan Hukum Perizinan Berusaha
Terintegrasi Dalam Perspektif Pemerintah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nama Mahasiswa : Slamet Budi Mulyono

Nomor Pokok Mahasiswa : 201820251003

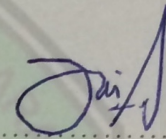
Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum / Hukum

Konsentrasi : Hukum Tata Negara

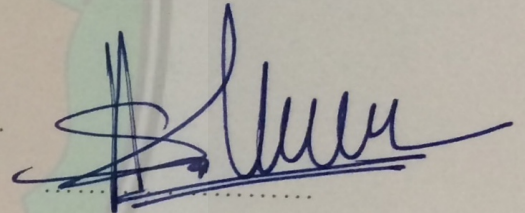
Bekasi, Februari 2021

Mengesahkan,

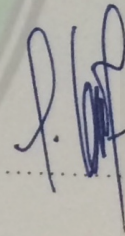
Ketua Tim Penguji : Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H.
NIDN. 0316077604



Penguji I : Sabela Gayo, S.H., M.H., Ph.D.
NIDN. 0307078203

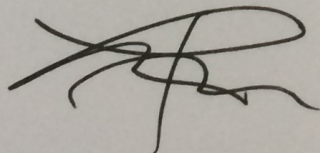


Penguji II : Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H.
NIDN. 0319077606



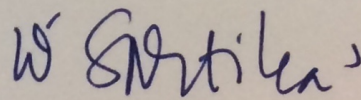
Mengetahui,

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum



Dr. Lusia Sulastri, S.H., M.H.
NIP. 2004464

Dekan
Fakultas Hukum



Dr. Ika Dewi Sartika S., S.H., M.H., M.M.
NIP. 2001450

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa ;

Tesis yang berjudul :

“ANALISA PEMBAHARUAN HUKUM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI DALAM PERSPEKTIF PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA”

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain, kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan Tesis ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan Tesis ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, Januari 2021

Yang membuat pernyataan,



Slamet Budi Mulyono

NPM. 201820251003

ABSTRAK

Slamet Budi Mulyono, 201820251003, Analisa Pembaharuan Hukum Perizinan Berusaha Terintegrasi Dalam Perspektif Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Dalam meningkatkan taraf perekonomian negara diperlukan peningkatan investasi modal usaha yang ada di Indonesia, yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional salah satu caranya adalah penciptaan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisiensi. Dalam rangka peningkatan penanaman modal/investasi dalam berusaha, Hambatan perizinan dalam dunia usaha tersebut ditanggulangi pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Presiden nomor 91 tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha Lembaran Negara nomor 210 tahun 2017, dimana salah satu tujuannya adalah mempercepat dan mempermudah pelayanan untuk berusaha dengan menerapkan penggunaan teknologi informasi melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission/ OSS*). Akan tetapi, sistem ini masih mempunyai polemik tersendiri yang terjadi, seperti disharmoni terhadap peraturan perundangan-undangan dan ketiadaan masa transisi atau peralihan, sehingga pengembangan sistem dan sosialisasi dilakukan sambil berjalan. Penelitian ini kemudian ditelaah menggunakan metode Yuridis Normatif yang mengutamakan penggunaan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Dari hasil pembahasan, peneliti menemukan kesimpulan yaitu pemerintah telah memberikan konsep dan terobosan baru tentang reformasi perizinan berusaha berupa OSS yang diharap lebih memihak kepada para Pelaku Usaha agar mendapatkan kepastian dalam proses perizinan. Selain itu, pemahaman atas perizinan yang membutuhkan pemenuhan komitmen agar izin berlaku efektif tidak semua pelaku usaha memahami alur prosesnya, karena hal tersebut tidak tergambar secara jelas pada PP nomor 24 Tahun 2018 ini.

Kata Kunci: Perizinan Berusaha, *Online Single Submission*, Perizinan Terintegrasi

ABSTRACT

Slamet Budi Mulyono, 201820251003, *Analysis of Integrated Business Licensing Law Renewal In the Perspective of the Provincial Government of the Special Capital Region of Jakarta.*

In improving the country's economic level, it is necessary to increase investment in business capital in Indonesia, which is expected to increase economic growth and increase the per capita income of the Indonesian people. One of the ways to increase national economic growth is to create an investment climate that is conducive, promotive, provides legal certainty, perpetuity, and efficiency. In order to increase investment / investment in business, the government overcame licensing barriers in the business world by issuing Presidential Regulation number 91 of 2017 concerning Acceleration of Implementing Business, State Gazette number 210 of 2017, where one of the objectives is to accelerate and facilitate services to do business by implementing use of information technology through an Electronically Integrated Business Licensing System (Online Single Submission / OSS). However, this system still has its own polemics that occur, such as disharmony with laws and regulations and the absence of a transitional or transitional period, so that system development and socialization are carried out on an ongoing basis. This research is then analyzed using the juridical normative method which prioritizes the use of secondary data obtained through library research. From the results of the discussion, the researchers found the conclusion that the government has provided new concepts and breakthroughs regarding business licensing reform in the form of OSS which are expected to be more pro-business to business actors in order to obtain certainty in the licensing process. In addition, not all business actors understand the flow of the process, because it is not clearly illustrated in Government Regulation Number 24 of 2018 that fulfilling the commitment to be effective.

Keywords: *Business Licensing, Online Single Submission, Integrated Licensing*

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Alloh SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahNya, peneliti berhasil menyelesaikan penulisan tesis ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Magister Ilmu Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penelitian ini muncul dan berangkat dari fenomena di bidang perizinan yang mengatakan “jika dapat dipersulit kenapa harus dipermudah” yang beredar di kalangan masyarakat khususnya para pelaku usaha atas sulitnya birokrasi perizinan di Indonesia. Seiring dengan semangat reformasi birokrasi dan tujuan kemudahan berusaha lahirlah kebijakan perizinan berusaha terintegrasi untuk menjawab tantangan tersebut.

Peneliti menyadari bahwa tesis ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Peneliti berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian skripsi ini dan secara khusus pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Dr. Bambang Karsono, Drs., S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Ika Dewi Saimima, S.H., M.M., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Dr. Lusiana Sulastri, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Dr. Dr. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H. selaku pembimbing pertama dan Dr. Awaludin Marwan, S.H., M.H., M.A, selaku pembimbing kedua atas penulisan tesis ini.
5. Para Dosen dan sekretariat Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan dukungan atas penulisan tesis ini.


6. Istri dan anak-anak tercinta yang memberikan dorongan moril dan memberikan waktu bagi peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini.
7. Rekan rekan sekelas angkatan 20 seperjuangan yang telah memberikan semangat, motivasi dan bantuan moril demi terlaksananya penelitian ini.

Semoga segala bantuan yang diberikan sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dicatat oleh Allah SWT sebagai amal ibadah. Aamiin.

Peneliti menyadari tesis ini masih banyak kekurangan di sana-sini, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan akan peneliti terima dengan senang hati. Semoga penelitian ini dapat menjadi alat yang besar dalam upaya kita meningkatkan kualitas pendidikan.

Bekasi, Januari 2021

Penulis,


Slamet Budi Mulyono

DAFTAR LAMPIRAN

Tabel 1.1 Data pemohon yang mengajukan Izin Usaha (SIUP) setelah mendapatkan NIB dari tahun 2019 sampai April 2020	11
Tabel 3.1 Daftar NSPK Kementerian/Lembaga	76
Gambar 1.1 Diagram Kerangka Teoritis	15
Gambar 1.2 Kerangka Pemikiran.....	30
Gambar 4.1 Peta Digital Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.....	120
Gambar 4.2 Tabel Peraturan Zonasi	121

